

## **BAB IV**

### **PERANAN OTTO ISKANDAR DINATA**

#### **A. Peranan Otto Iskandar Dinata Pada Masa Penjajahan Belanda**

Sejarah Pergerakan Nasional adalah bagian dari Sejarah Indonesia yang meliputi periode sekitar empat puluh tahun, yang dimulai sejak lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang pertama tahun 1908 sampai terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang ditandai oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah Pergerakan Nasional sebagai fenomena historis merupakan hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural dan religius dan di antara faktor-faktor itu saling terjadi interaksi.

Bangunnya rakyat terjajah dan penolakan terhadap hubungan kolonial disebut nasionalisme yang memiliki unsur-unsur kebangunan politik, ekonomi, sosial, kultural dan religius. Unsur-unsur itu semua dikembangkan untuk mencapai pembaharuan ke arah kemandirian dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan

lahirnya Budi Utomo yang dianggap sebagai manifestasi lahirnya jiwa nasionalisme, maka jelas kiranya bahwa kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri yang memberi kekuatan dan pergaulan hidup kolonial itulah yang memberi corak nasionalisme Indonesia. Sementara itu, lahirnya Budi Utomo banyak dihubungkan dengan Timur telah sadar, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1904-1905, dan akibat perkembangan politik etis.<sup>1</sup>

### **1. Dampak Politik Etis**

Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah kolonial Belanda dari hasil eksploitasi kekayaan di Nusantara begitu besar. Keuntungan yang terutama diperoleh dari Tanam Paksa ini dipergunakan untuk kepentingan pemerintah di Negeri Belanda, seperti untuk melunasi utang, menurunkan pajak, membangun rel kereta api, dan untuk kepentingan pertahanan. Van Deventer dalam majalah *De Gids* menyebutkan jutaan gulden yang dihasilkan dari Hindia Belanda itu sebagai *Een Eereschuld*, atau

---

<sup>1</sup>Ayi Budi Santosa dan Encep Supriatna, *Buku Ajar Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945)*, (Bandung : Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2008), p. 12.

“utang kehormatan”. Menurut tokoh liberal ini, Negeri Belanda berutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas dari Hindia Belanda dan “utang kehormatan” itu sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Hindia Belanda di dalam kebijakan kolonial.<sup>2</sup>

## **2. Boedi Oetomo**

Dr. Wahidin Soedirohoesodo ( 1857 – 1917 ), lulusan STOVIA, sekolah Dokter Jawa, antara tahun 1906 – 1907 berkeliling Pulau Jawa untuk berkampanye meningkatkan martabat rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentk “Dana Pelajar”. Usaha ini ternyata tidak begitu berhasil. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan pemuda Soetomo, siswa STOVIA di Batavia. Perbincangan tentang nasib rakyat ternyata menggugah Soetomo untuk mendiskusikan hal ini dengan teman-teman nya. Akhirnya pada

---

<sup>2</sup> Nina H. Lubis, *Si Jalak Harupat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003) p. 39

tanggal 20 Mei 1908 berdirilah Boedi Oetomo dengan Soetomo sebagai ketuanya.<sup>3</sup>

### **3. Aktivitas R. Oto Iskandar di Nata dalam Boedi Oetomo**

Ketika bersekolah di HKS ( *Hoogere Kweekschool* ) di Purworejo, Jawa Tengah, pada tahun 1917-1920, R. Oto Iskandar di Nata sudah tertarik dengan dunia politik. Ia memasuki organisasi Boedi Oetomo di daerah itu. Keikutsertannya dalam organisasi tersebut dilanjutkannya ketika ia menjadi guru, baik ketika di HIS ( *Hollandsch Inlandsche School* ) Banjarnegara ( 1920 – 1921 ), HIS bersubsidi Bandung ( 1921 – 1924 ), maupun ketika menjadi guru di HIS Negeri Pekalongan ( 1924 – 1928 ). Dalam Boedi Oetomo , R. Oto Iskandar di Nata sepat menduduki posisi penting, yaitu menjadi wakil ketua Boedi Oetomo Cabang Bandung ketika ia bertugas di Bandung dan wakil ketua Boedi Oetomo Cabang Pekalongan ketika ia bertugas di Pekalongan. Bahkan ketika di Pekalongan ia merangkap sebagai komisaris dari *Hoofdbestuur* ( *Pengurus Besar* ) Boedi Oetomo yang

---

<sup>3</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 40

kemudian mengantarkannya menjadi anggota *Gemeenteraad* ( Dewan Kota ) Pekalongan mewakili Boedi Oetomo.<sup>4</sup>

Kedudukan R. Oto dalam Dewan Kota bagi pucuk dicinta ulam tiba. Di sinilah ia bisa berperan dalam membela kebenaran dan memperjuangkan hak rakyat kecil. Akibatnya, bersama dengan teman-temannya dari Boedi Oetomo, yaitu Darmosoegito dan Kartosoebroto, serta Fadhoel dari Partai Sarekat Islam, ia dimasukkan dalam daftar hitam pemerintahan kolonial. Bila terjadi sesuatu di Pekalongan yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan, mereka sering dituduh sebagai biang keladi kejadian tersebut. Polisi Rahasia Hindia Belanda (PID = *Politieke Inlichtingen Dienst* ) sering membuntuti bila mereka kelihatan kumpul-kumpul. Lama kelamaan anggota PID itu disuruh ikut masuk mendengarkan pembicaraan mereka. Eh, ternyata, lama-lama ia tertarik menjadi anggota Boedi Oetomo. Ia menyadari bahwa yang dibicarakan oleh para anggota Boedi Oetomo itu adalah soal kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Pembicaraan itu juga tidak berkaitan dengan

---

<sup>4</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 44

soal agitasi atau hasutan yang membahayakan umum. Konon, sejak itu ia masuk menjadi anggota Boedi Oetomo.

Ketika menjadi anggota Dewan Kota Pekalongan itu, R. Oto berhasil membongkar kasus Bendungan Kemuning. Dalam kasus ini, rakyat terselamatkan dari penipuan yang dilakukan oleh pengusaha Belanda. Keberanian R. Oto membongkar kasus ini membuat Residen Pekalongan marah. Akibatnya R. Oto dimasukkan kedalam daftar hitam orang-orang yang diancam hukum buang. Akan tetapi, R. Oto tidak takut dengan ancaman itu. Konflik dengan Residen Pekalongan pun akhirnya selesai dengan dipindahkannya Residen Pekalongan.<sup>5</sup>

Dengan terjadinya kasus Bendungan Kemuning itu, nama R. Oto semakin populer. Ia dikenal sebagai orang yang mudah bergaul. Melalui permainan sepak bola yang digemarinya, ia bersahabat dengan Kepala Penjara Pekalongan. Dalam klub sepakbola ini R. Oto dikenal sebagai pemain gelandang tengah yang tangguh. Dalam pergaulan ini R. Oto tidak pernah lupa pada profesinya sebagai guru, sehingga dalam suatu kesempatan, R

---

<sup>5</sup> Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 45

Oto mengajukan usul kepada sahabatnya itu agar para narapidana diberi pelajaran membaca dan menulis. Ternyata usulnya diterima dengan baik. Mengingat profesinya itu pula, R. Oto yang lahir di Pekalongan, yaitu Ny. Martini, menceritakan bahwa dalam rangka pembukaan sekolah itu, R. Oto membawa isterinya, Ny. R.A Soekirah untuk menghadapi Bupati Pekalongan. Sebelum menghadap, R. Oto berpesan kepada isterinya, bila menghadap bupati nanti, ia tidak boleh berjalan *gengsor* (jalan sambil jongkok) dan harus duduk dikursi, tidak boleh duduk dibawah sebagaimana kebiasaan yang berlaku bila orang menghadap kepada bupati.

Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir dengan sepal-terjang R. Oto di Pekalongan. Popularitasnya dianggap membahayakan, sehingga akhirnya ia dialihkan ke Batavia pada tahun 1928 untuk mengajar di HIS Muhamadiyah bersubsidi. Karier R. Oto dalam organisasi Boedi Oetomo pun berakhir pada tahun itu.

Setelah berdiri Budi Utomo kemudian disusul oleh organisasi-organisasi daerah yang mencerminkan identitas dan

perkembangan sosio-kultural daerah. Organisasi-organisasi tersebut antara lain:

Pada bulan september 1914, perkumpulan Pasundan didirikan di Jakarta bertujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, memperluas, tenaga kerja, dan kehidupan masyarakat. Diantara pemimpinya ialah R. Kosasih Surakusumah, R. Otto Kusuma Subrata, R. Otto Iskandar Dinata, dan lain lainnya.

Setelah pindah ke Batavia, R. Oto keluar dari organisasi Boedi Oetomo dan kemudian memasuki organisasi Pagoejoeban Pasoendan Cabang Batavia pada bulan Juli tahun 1928. Dalam organisasi yang baru dimasukinya itu, R. Oto Iskandar di Nata langsung menduduki posisi Sekertaris Pengurus Besar. Kemudian pada Kongres Pagoejoeban Pasoendan yang diselenggarakan di Bandung bulan Desember 1928, R. Oto Iskandar di Nata dipilih sebagai Ketua Pengurus Besar Pagoejoeban Pasoendan. Jabatan tersebut diembannya sampai tahun 1942 karena sejak tahun itu Pagoejoeban Pasoendan secara formal dibubarkan oleh

pemerintah Bala Tentara Jepang yang mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda pada tahun itu.<sup>6</sup>

Pada masa kepemimpinan R. Oto Iskandar di Nata, organisasi Pagoejoeban Pasoendan mengalami kemajuan pesat di semua bidang kegiatannya, yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, dan kewanitaan serta kepemudaan seperti yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Meskipun organisasi ini berbasis masyarakat Sunda, jangkauan perjuangan bersifat nasional. Karena itu, tidak salah kalau Pagoejoeban Pasoendan dikategorikan sebagai pergerakan etnonasionalis.

### **1. Mendapat Julukan Si Jalak Harupat**

Pada tanggal 15 Juni 1931, R. Oto Iskandar di Nata menjadi anggota *Volksraad* sebagai wakil Pagoejoeban Pasoendan. Ia duduk dalam Dewan Rakyat itu selama tiga periode yaitu 1931-1934, 1935-1938, dan 1939-1942, dan tergabung dalam Fraksi Nasional yang didirikan oleh Mohamad Hoesni Thamrin, Ketua Perkumpulan Kaum Keerdekaan nasional ini, R. Oto Iskandar di Nata pernah menjadi pemimpinnya,

---

<sup>6</sup> Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 56

disamping Hoesni Thamrin, Soekardjo Wirjopranoto, R. Panji Suroso, dan lain-lain.

Dalam sidang *Volksraad* antara tahun 1931-1932, R. Oto benar-benar menemukan tempat untuk menyuarakan kepentingan rakyat jajahan. Dalam sidang itu, R. Oto berkehendak menggunakan bahasa Melayu, agar pidatonya bisa dipahami oleh rakyat yang tidak bisa berbahasa Belanda. Akan tetapi, Ketua Sidang memintanya agar menggunakan bahasa Belanda. Terpaksalah R. Oto tunduk kepada aturan yang berlaku.

Pidatonya disampaikan dengan suara menggelegak dan isinya sangat keras dalam mengkritik Pemerintah Hindia Belanda. Untuk melihat bagaimana kerasnya pidato R. Oto, berikut ini petikan sebagian pidatonya yang sudah diterjemahkan. Pidatonya itu disampaikan dalam dua babak acara persidangan.

**R. Oto Iskandar di Nata:**

“Tuan Ketua! Meskipun dalam memori jawaban disebutkan bahwa hubungan antara Hindia dan Negeri Belanda sebenarnya mengenai kebijakan pucuk pemerintahan, pertimbangan saya ada baiknya mengemukakan pendapat saya tentang pengangkutan

Gubernur Jenderal yang baru. Bukan untuk saling menunjukkan paham dengan pemerintah.”<sup>7</sup>

## 2. Berjuang Melalui Dunia Pers

Pagoejoeban Pasoendan pada masa kepemimpinan R. Oto Iskandar di Nata meningkatkan penerbitan surat kabar *Sipatahoenan*. Surat kabar ini mulainya diterbitkan oleh Pagoejoeban Pasoendan Cabang Tasikmalaya pada tahun 1923. Pimpinan redaksinya adalah Soetisna Sendjaja (biasa ditulis namanya “Soetsn”), seorang wartawan yang bekerja “*met hart en nier*” (bekerja dengan sepenuh hati secara tulus dan ikhlas). Semula surat kabar ini hanya terbit sekali seminggu. Sekitar tahun 1928 dibawah pimpinan Bakrie Soeraatmajda penerbitannya ditingkatkan menjadi dua kali seminggu. Kemudian pada tahun 1930 redaksi dibantu oleh Mohamad Koerdi.<sup>8</sup>

Pada tahun 1931 pengelolaan surat kabar tersebut diambil alih oleh Pengurus Besar Pagoejoeban Pasoendan dan penerbitannya ditingkatkan menjadi harian. Kantor redaksinya

---

<sup>7</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 80

<sup>8</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 105

pun dipindahkan dari Tasikmalaya ke Bandung dan berkantor di Jalan Kaca-kaca Wetan. Kemudian pada tahun 1933 kantor dipindahkan ke Jalan Banceuy. Surat kabar *Sipatahoenan* waktu itu boleh disebut sebagai “corong” Pagoejoeban Pasoendan.

Untuk meningkatkan kinerjanya, pada tahun 1934 kantor redaksinya dipindahkan lagi ke *Moskeeweg* (Jl. Dalem Kaum sekarang). Pemimpin redaksinya pada masa itu masih Bakrie Soeraatmadja. Surat kabar ini di cetak dipercepatan kalangan sendiri yang bernama percetakan Pangharepan. Percetakan ini sejak semula adalah milik Partaatmadja, seorang bekas karyawan percetakan *Algemeene Indisch Dagblad* (AID) atau *Preanger Bode*, milik Belanda. Suatu ketika Partaatmadja dan kawan-kawannya melakukan pemogokkan sebagai protes atas kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan para karyawan. Akibatnya mereka harus hengkang dari perusahaan percetakan surat kabar itu. Untunglah mereka sudah memiliki keahlian di bidang percetakan surat kabar, dan dengan bekal keahlian ditambah modal milik sendiri, Partaatmadja mendirikan Percetakan Pangharepan di Jl. Banceuy. Anak Partaatmadja yang bernama

Rochdi, ikut bekerja di percetakan tersebut, dan lama kelamaan aktif pula sebagai wartawan *Sipatahoenan*.<sup>9</sup>

Dalam pemberitaannya, *Sipatahoenan* sering bersuara keras dan mengkritik kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, beberapa kali pengasuhnya harus berhadapan dengan polisi rahasia kolonial, PID, dan di hadapkan ke pengadilan. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain : (1) tidak lama sesudah pindah dari Tasikmalaya ke Bandung, *Sipatahoenan* terjat Persbreidelgu; (2) Pemerintah Hindia Belanda pernah memutuskan bahwa *Sipatahoenan* merupakan bacaan terlarang bagi seluruh anggota tentara Hindia Belanda termasuk para pegawai Departemen Peperangan ( *Departement van Oorlog* ); (3) sebuah laporan yang menginformasikan tentang penangkapan Ir. Soekarno untuk kedua kalinya yang kemudian dimasukkan ke Penjara Sukamiskin sebelum dibuang ke Ende, Flores, diungkapkan oleh pengarangnya bagaikan seorang ksatria yang sedang melawan seorang penjahat. Ksatria itu harus memilih salah satu: menyerahkan barang atau mati. Maksudnya adalah

---

<sup>9</sup> Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 106

Soekarno diharuskan memilih antara keyakinan politiknya atau keselamatan dirinya sendiri. Akibatnya, penulis berita, Bakrie Soeraatmadja, harus mendekam di penjara Sukamsikin selama tiga bulan. Pemimpin redaksi kemudian dijabat oleh Mohamad Koerdi.

Ketika kantor *Sipatahoenan* bertempat di Jl. Dalem Kaum, R. Oto Iskandar di Nata, berkantor di tingkat dua. Pelukis terkenal Barli Sasmitawinata menuturkan bahwa pada akhir tahun 30-an itu ia menjadi ilustrator surat kabar tersebut. Pada suatu hari, ia membuat karikatur wajah R. Oto yang akan dimuat keesokan harinya. Barli entah mengapa melukis R. Oto tanpa kopiah ataupun *bendo* (tutup kepala tradisional Sunda), padahal sehari-hari R. Oto biasa mengenakannya. Karena merasa ragu, jangan-jangan pak Oto akan marah bila karikaturinya tanpa tutup kepala jadi dimuat, pelukis Barli, yang saat itu belum genap berusia 20 tahun, naik ke tangga ia merasa deg-degan juga jangan-jangan... Ternyata dugaannya meleset. Sambil melihat gambar itu, Pak Oto tersenyum dan berkomentar “Tidak apa-apa gambar wajah tanpa penutup kepala ini dimuat, karena untuk

menilai orang tidak perlu dilihat dari kopiah atau *bendo*-nya; yang penting apa yang ada di balik penutup kepala itu.” Pelukis Barli merasa lega sekaligus menyimpulkan, betapa dalam wawasan Pak Oto. Jadi, menurut R. Oto, kepribadian seseorang tidaklah bisa diukur dari penampilan fisik belaka, yang penting bagaimana pola pikirannya, itulah yang akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Pemakaian *bendo* bukanlah tolok ukur ke-Sunda-an seseorang, demikian juga kopiah, bukan tolok ukur nasionalis-tidaknya seseorang.

### **3. Memimpin Surat Kabar Tjahaja**

Pada masa penjajahan Jepang, Otto menjadi Pemimpin surat kabar *Tjahaja* (1942-1945).

Pada tahun 1942 surat kabar *Sipatahoenan* dan Sepakat dilarang terbit oleh pemerintah pendudukan Jepang. Sebagai gantinya, R. Oto Iskandar di Nata bersama wartawan Moehamad Koerdi dibawah pengawasan Jepang ditugaskan menerbitkan sebuah surat kabar di Kota Bandung yang akan menjadi “corong” pemerintah. Untuk keperluan itu, percetakan dan surat kabar milik Belanda *De Preanger Bode* (AID) , yang berkantor di

*Grote Postweg* no.54-55 ( Jl.Asia Afrika Sekarang ) diambil alih oleh pemerintahan Militer Jepang. Direktur surat kabar pemerintah yang diberi nama *Tjahaja* itu adala R. Oto Iskandar di Nata. Pemimpin pusat redaksinya A. Hamid,dan pemimpin administrasinya Niti Soemantri. Surat kabar menggunakan bahasa Indonesia ini seolah merupakan gabungan dari koran *Sipatahoenan, Sepakat, Nicork Express ,Sinar Pasoendan*, karena wartawan dari harian-harian tersebut bergabung didalamnya. R. Oto diangkat sebagai direktur karena saat itu Jepang sudah mengetahui diantara para tokoh surat kabar itu R. Oto dianggap sebagai tokoh nasional. Seorang wartawan Jepang ditempatkan sebagai pengawas surat kabar tersebut, agar isinya sesuai dengan kebijakan pemerintah militer Jepang. Oleh para pengelola surat kabar, wartawan Jepang ini hanya dianggap sebagai “*bebegig*” (orang-orangan penjaga padi disawah),karena rupanya ia tidak paham bahasa Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam surat kabar *Tjahaja*, beberapa tulisan R. Oto Iskandar di Nata dapat dibaca. Sejak terbitnya, isi surat kabar

---

<sup>10</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 109

benar-benar menyuarakan kebijakan pemerintah. Pujian atas keberaniannya prajurit Jepang, keberhasilan menaklukkan musuh di lautan, di daratan, dan di udara, menjadi berita sehari-hari. Sebaliknya berita kegagalan serangan atau kekalahan mereka tidak dimuat. Kalaupun terpaksa dimuat, bahasanya mengalami eufemisasi agar terasa manis.

Akan tetapi, fakta dilapangan semakin sulit dibantah, sehingga mendekati kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945, berita pujian itu semakin menghilang. Sebaliknya berita mengenai usaha yang dilakukan oleh BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) semakin gencar. Hari-hari akhir penjajahan Jepang semakin terefleksikan dalam berita-berita *Tjahaja*. Berita kegiatan PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) hampir setiap hari ditampilkan. Meskipun demikian, pemerintah Jepang masih juga berusaha menutupnya. Misalnya, dalam *Tjahaja*, bertanggal 13 Agustus '05 (sic!), ada judul berita demikian: “Satoe Kapal Penempoer Moesoeh ditenggelamkan oleh kapal-kapal selam kita di Laoet Tedoeh Tengah”. Isi berita satu kolom itu 90% tentang

kehebatan pasukan Jepang, dan berita kekalahan Jepang hanya ditulis dalam dua baris saja: “ Ketika kehilangan 2 pesawat terbang jang berdjibakoe”. Tampak jelas usaha pemerintah Jepang untuk membentuk opini publik bahwa Jepang masih jaya. Padahal fakta sejarah menunjukkan sebaliknya, kekalahan di berbagai *front* mulai menggelisahkan Pemerintah Jepang. Sementara itu, dibagian bawah berita diatas terpampang foto para anggota PPKI, termasuk foto R. Oto Iskandar di Nata.

## **B. Peranan Otto Iskandar Dinata Pada Masa Penjajahan Jepang**

Pada tanggal 1 Maret 1942 Tentara Keenambelas Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Kemudian tanggal 5 Maret 1942, Kota Batavia dinyatakan sebagai “kota terbuka” oleh Pemerintah Hindia Belanda, artinya Jepang bebas mengambil alih ibukota. Pasukan Jepang langsung bergerak menuju Bogor. Subang kemudian diduduki pasukan Jepang yang datang dari Eretan. Mereka terus menerobos ke Lapangan Terbang Kalijati, dan tempat penting ini jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 4 Maret.

Jepang berniat menyerbu Bandung dengan bergerak dari Kalijati. Pertahanan tentara Belanda di Ciater digempur habis. Pasukan Belanda bertahan di Lembang, tetapi akhirnya tempat ini jatuh ke tangan Jepang. Panglima KNIL, Letjen Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjardavan Stachouwer berpendapat bahwa di Bandung tidak boleh ada pertempuran karena kota ini sudah penuh sesak dengan pengungsi yang terdiri atas penduduk sipil, wanita, anak-anak. Jepang menuntut penyerahan total Belanda kepada mereka. Bila ultimatum ini tidak diindahkan, Kota Bandung akan dibom. Jepang yang tidak sabar lagi menggerakkan dengan membom alun-alun Bandung. R. Oto Iskandar di Nata selaku Ketua *Luchtbeschermingdiens* (LBD) dan para mahasiswa THS yang berada di Jalan Dalem Kaum langsung menangani korban yang gugur maupun yang luka. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret puluhan pesawat terbang Jepang mengadakan *show of force* diatas Kota Bandung dengan ancaman bila Belanda tidak menyerah Kota Bandung akan di bom lagi. Akhirnya penyerahan tanpa syarat dari Letjen Ter Poorten kepada Panglima Tentara Jepang Letjen Hitoshi Imamura dilakukan di Kalijati pada tanggal

8 Maret 1942. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dimulailah babak penjajahan baru dibawah pemerintahan militer Jepang.

Pada mulanya kedatangan Jepang yang mengaku sebagai “saudara tua” itu disambut dengan penuh harapan karena mereka dapat mengusir penjajah Belanda. Siapa tahu Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan dengan bantuan mereka ini. Di Jawa Barat, para pejabat militer Jepang mengadakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Kolonel Matsui menjabat sebagai Gubernur, Raden Pandoe Soeradiningrat, dan pembantu Wakil Gubernur adalah Atik Soeardi, tokoh Pagoejoeban Pasoendan.

Harapan besar itu ternyata harus disisihkan karena Jepang mulai menunjukkan maksud kedatangan mereka yang sesungguhnya. Dengan Undang-undang *Osamu* no.3, tanggal 20 Maret 1943 pemerintah militer Jepang melarang semua bentuk pertemuan, pergerakan, atau kegiatan politik lainnya. Selanjutnya, dengan Undang-undang *Osamu* no.4 ditetapkan bahwa hanya bendera Jepang saja yang boleh dikibarkan pada

hari-hari besar dan lagu Kimigayo yang boleh dinyanyikan dalam upacara-upacara resmi. Bahkan sejak tanggal 1 April 1942, waktu Jepang yang dipergunakan secara resmi dan disusul dengan ketentuan bahwa mulai tanggal 29 April 1942, tahun yang dipergunakan adalah tahun Sumera, dimana tahun 1942 dihitung sebagai tahun 2602.

Demikian drastis perubahan yang dilakukan Jepang. Bagi penjajah baru ini hanya ada dua prioritas : menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan pribumi dan memobilisasikan rakyat demi kemenangan Jepang. Partai-partai politik membekukan diri dari segala kegiatannya. Demikian juga Pagoejoeban Pasoendan. Karena itu, untuk menyelamatkan aset Pagoejoeban Pasoendan, R. Oto Iskandar di Nata membentuk Badan Usaha Pasoendan dan mengangkat R. Sanoesi Hardjadinata sebagai ketuanya. Karena pemerintah militer Jepang masih mengizinkan kegiatan dibidang lain, kecuali politik, tidak ada pilihan lain bagi Pagoejoeban Pasoendan dan partai-partai politik lainnya, kecuali bergiat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pemerintah militer Jepang kemudian juga

membekukan koran-koran yang ada. Seperti telah dikemukakan terlebih dahulu, R. Oto Iskandar di Nata diminta memimpin surat kabar Tjahaja menggantikan koran *Sipatahoenan*, *Nicork Express*, dan *Sinar Pasoendan* yang terbit di Bandung. Sementara itu, Soekardjo Wirjopranoto diminta memimpin *Sinar Baru* di Semarang.

### **1. Mobilisasi Rakyat**

Pemerintah miiter Jepang berusaha memobilisasi rakyat Indonesia melalui organisasi yang disebut *Gerakan Tiga A*, dengan mottonya: “Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia”. Gerakan ini ternyata tidak menarik hati rakyat dan pada bulan September 1942 dibubakan. Pemerintah pendudukan ini kemudian memunculkan organisasi baru yang dikenal dengan PUTERA ( Pusat Tenaga Rakyat ) pada tanggal 9 Maret 1943 yang dipimpin oleh Empat Serangkai : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan KH Mas Mansjoer. PUTERA ini dimaksudkan untuk memusatkan segala

potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perang Jepang.<sup>11</sup>

Untuk kepentingan memenangkan peperangannya, Jepang mulai mengarahkan usaha-usaha untuk mobilisasi secara militer. Pada tanggal 29 April 1943, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, dibentuk *Seinendan*, korps pemuda berusia antara 14-25 tahun yang bersifat semi-militer. Untuk yang berusia diatas 25 tahun hingga 35 tahun dibentuk *Keibodan* ( Korps Kewaspadaan ) sebagai organisasi polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Jumlah anggota *Seinendan* sekitar 500.000 orang pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, sedangkan anggota *Keibodan* jumlahnya sekitar satu juta orang. Sementara itu untuk mengarahkan tenaga wanita dibentuk *Fujinkai* (Himpunan Wanita), yang keanggotaannya diperuntukkan bagi mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Kepada kaum wanita ini juga diberikan latihan militer. Kemudian pada bulan April 1943 dibentuk *Heiho* (Pasukan Pembantu) sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang,

---

<sup>11</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p. 116

dimana para pemuda Indonesia mendapat latihan dasar yang sama dengan pemuda Jepang. Jumlah Heiho ini diperkirakan 42.000 orang.

## **2. Pembela Tanah Air (PETA)**

Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang merasa perlu untuk membentuk organisasi militer yang baru, yaitu Pembela Tanah Air (PETA). Organisasi ini merupakan organisasi tentara sukarela ( *giyugun* ) yang tidak secara resmi menjadi bagian dari balatentara Jepang, dan menjadi pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu.

Proses pembuatan PETA cukup menarik. Menurut salah satu sumber, Gatot Mangkoepradja mengusulkan untuk membentuk tentara yang anggotanya sepenuhnya terdiri dari orang Indonesia. Surat usulan dibuat setelah Gatot Mangkoepradja membaca berita dalam surat kabar Tjahaja yang dipimpin oleh R. Otto Iskandar Dinata bahwa sedang ada persiapan pembentukan tentara di Indonesia. Berita yang di lansir dari Tokyo ini bersumber dari Soetardjo Kartohadikoesoemo yang datang diundang ke Tokyo pada tanggal 3 September 1943, bersama para pemimpin Indonesia lainnya. Kemudian Gatot

Magkoepradja berunding dengan R. Otto Iskandar Dinata, Ijos Wiriaatmadja dan Diding Ibnu Hasjim mengenai hal ini. Selanjutnya Gatot membuat surat terbuka dalam surat kabar Tjahaja, yang isinya menyatakan bahwa ia setuju untuk dibentuknya tentara, tetapi bukan milisi. Tugas tentara ini adalah untuk mempertahankan kampung halaman sendiri. Akibat dimuatnya surat ini, Gatot ditahan oleh Kempeitai Sukabumi. Dengan pertolongan seorang temannya yang orang Jepang, Gatot dikeluarkan dari tahanan. Akan tetapi, keesokan harinya ia dibawa ke Jakarta untuk diinterogasi oleh para pembesar Jepang. Entah bagaimana, pada tanggal 7 September 1943, Gatot melayangkan surat permohonan pembentukan PETA kepada *Saiko Sikkon* dan *Gunseikan*. Menurut salah satu sumber, surat itu ditulis dengan darahnya sendiri. Agaknya pihak Jepang sengaja meminta agar Gatot menulis surat permohonan ini kepada *Gunseikan*, agar inisiatif seolah-olah datang dari pihak Indonesia, padahal mereka sudah punya niat sebelumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 119 - 120

Yang jelas, peranan R. Otto Iskandar Dinata dalam pembentukan PETA ini tidak kecil. Gagasan awal tentang pembentukan PETA ini, baik yang bersumber dari pemimpin Indonesia yang sedang di Tokyo maupun gagasan Gatot Mangkoepradja, dikomunikasikan melalui surat kabar yang dipimpin oleh R. Otto yaitu Tjahaja. Bahkan gagasan yang dikemukakan secara tertulis oleh Gatot Mangkoepradja, yang juga tokoh Pagoejoeban Pasoendan itu, juga merupakan hasil perundingan dengan R. Otto Iskandar Dinata. Puteri R. Otto, yaitu Ibu Martini Soemali, menyatakan bahwa memang ayahnya kerap berunding dengan Gatot Mangkoepradja mengenai rencana pembentukan PETA ini. R. Otto sebagai penggagas PETA berpikir jauh kedepan, bahwa bila kemerdekaan sudah ditangan, kita akan memerlukan tentara yang memiliki kecakapan dibidang pertahanan. Itu sebabnya PETA diperlukan, meski kita harus dilatih oleh orang Jepang sekalipun. Para pemuda didorong untuk masuk PETA, termasuk putera tertuanya. Seperti telah dikemukakan, Putera R. Otto yang tertua yaitu Sentot diminta oleh ayahnya untuk masuk menjadi anggota PETA, meski tadinya

ia ingin menjadi mahasiswa di THS ( sekarang ITB ). Ini menjadi bukti bahwa R. Otto memberikan contoh kepada masyarakat dengan bukti, bukan dengan kata-kata saja. Ia menunjukkan bahwa kepentingan negara harus ditempatkan diatas kepentingan pribadi.

Ternyata PETA banyak menarik minat pemuda kita. Jumlah anggota PETA sangat besar, hingga akhir peperangan berjumlah sekitar 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatera. Korps perwiranya terdiri atas para pejabat, para guru, para kyai, da orang-orang indonesia mantan tentara kolonial.

R. Oto Iskandar Dinata yang sejak dahulu selalu melihat kebutuhan rakyat, dalam sidang ketiga *Chou Sang-in* ini juga mengusulkan agar pemerintah militer memperhatikan masalah sandang pangan. Sidang memutuskan agar tenaga rakyat dikerahkan untuk menghasilkan bahan pakaian dengan menggalakkan tanaman kapas dan tanaman penghasil serat lainnya. Dalam sidang-sidang berikutnya, R. Otto Iskandar Dinata juga mengusulkan dibentuknya “barisan pengangkut” yang dapat bergerak cepat untuk keperluan perang maupun untuk

pengangkutan bahan pangan. Selain itu, diusulkan pula dibentuknya “Pasukan Palang Merah”

### 3. BPUPKI dan PPKI

Kekalahan demi kekalahan dalam pertempuran yang dialami Jepang menyebabkan mereka harus lebih mempersiapkan diri untuk kehilangan kekuasaannya di tanah jajahan. Oleh karena itu pada bulan Maret 1945, pemerintah militer Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyosakai*. Anggotanya, yang mewakili semua aliran pemikiran yang ada di Jawa, berjumlah 60 orang di samping Ketua dan dua orang wakil ketua ditambah enam anggota tambahan. Ketua BPUPKI adalah KRT Radjiman Wedyodiningrat, Wakil Ketuanya, Ichibangase Yosio dan R.P Soeroso. Setengah dari anggota *Chou-Sangi-In* menjadi anggota BPUPKI. R. Otto Iskandar Dinata menjadi salah seorang anggotanya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nina H. Lubis, *Si Jalak ...* p 123

Dibentuknya BPUPKI merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Perdana Menteri Kosio tentang “kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari”. Maksud didirikannya badan ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Badan ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 bertempat di Gedung Chou-Sangi-In, di Pejmbon.

BPUPKI bersidang untuk pertama kalinya antara tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 1945 dan sidang kedua dari tanggal 10 Juli – 14 Juli 1945 dan sidang pertama dibicarakan masalah dasar negara. Pembicaraannya adalah Mr.Moeh.Jamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dari pembicaraan ini lahirlah Pancasila sebagai Dasar Negara RI. BPUPKI kemudian reses selama satu bulan, setelah sebelumnya dibentuk suatu panitia kecil berjumlah delapan orang dibawah pimpinan Ir. Soekarno. R. Otto Iskandar Dinata menjadi anggota panitia kecil ini bersama-sama dengan Drs. Moh. Hatta, Soetardjo Kartohadisoemo, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Moeh. Jamin, dan A.A Maramis. Kemudian panitia kecil ini melakukan pertemuan dengan anggota

– anggota BPUPKI yang kemudian melahirkan Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Jamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, KH Abd.Kahar Moezakir, KH Wachid Hasjim, H. Agoes Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Panitia ini merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka dalam rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Dalam persidangan kedua, 10 Juli 1945, dibahas Rencana Undang-undang Dasar. R. Oto Iskandar di Nata menjadi anggota panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir.Soekarno.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, ketika perjuangan menuju kemerdekaan semakin memuncak, didirikanlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritshu Zyunbi Linkai* sebagai ganti BPUPKI. Ketuanya adalah Ir. Soekarno dengan wakil ketua Drs. Moh. Hatta. Anggotanya berjumlah 21 orang yang dipilih sendiri oleh jenderal Besar Terauchi. R. Oto Iskandardi Nata adalah salah seorang diantaranya.